

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Upaya kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam periode 2019-2024 merupakan usaha menutupi kegagalan sistemik yang telah dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan manusia seperti kelompok Kapten Bram selama beberapa tahun. Dari perspektif Neoliberal Institusionalisme, hal ini dihasilkan dari formalisasi kerangka hukum melalui berbagai bentuk penguatan kerja sama. Pertama, dokumen *Arrangement Between Indonesia National Police (INP) and Australian Federal Police (AFP) on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crime* tahun 2023 yang memberikan legitimasi operasi yang kuat bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Australian Federal Police (AFP) di lapangan. Dokumen ini menjadi alat hukum penting yang meningkatkan kolaborasi antara Polri dan AFP dalam memerangi kejahatan penyelundupan manusia. Dokumen perjanjian ini bukan hanya alat diplomatik, melainkan juga berfungsi sebagai "payung hukum" atau instrumen institusional utama yang memberikan legitimasi operasional bagi Polri dan AFP.

Kedua, pembentukan Kantor Perhubungan Kriminal Transnasional di Perbatasan atau *Border Transnational Crime Liaison Office (BTNCLO)*. Pembentukan BTNCLO bertujuan untuk mengatasi hambatan birokrasi dalam penanganan kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan imigran, dimana BTNCLO menjadi jembatan antara Divhubinter Polri dengan satuan wilayah

(Polda/Polres) serta mitra asing (*counterparts*). Pada 2025, BTNCLO sudah tersebar di 13 daerah perbatasan dengan sekitar 120 personel atau *Border Liaison Office* (BLO) sebagai perpanjangan tangan Divhubinter Polri di lapangan. Para BLO atau koordinator BLO ditugaskan untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan menyajikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri. Salah satu laporan yang disajikan oleh BLO adalah analisis fakta dan intelijen terhadap situasi keamanan di perbatasan untuk menjadi *early warning system* bagi pimpinan Polri. Adapun laporan informasi khusus yang memuat informasi mengenai temuan dan kejadian kejahatan transnasional yang terjadi di perbatasan dan penanganannya oleh para penyidik, serta hambatan yang dihadapi.

Ketiga, pembentukan unit khusus seperti Bagian Perbatasan Internasional (Bagbatanas) di bawah Sekretariat NCB-Interpol Indonesia, Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang bertujuan untuk membangun "mesin" kerja sama yang berkelanjutan, sistemik, dan tidak lagi bersifat *ad-hoc*. Koordinasi perbatasan selalu terbagi ke dalam banyak unit sebelum Bagian Perbatasan Internasional dibentuk, dimana kondisi ini menghambat respons terhadap pergerakan penyelundup. Oleh karena itu, Polri membentuk unit khusus untuk menangani kasus kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia di perbatasan, yang berfungsi menghubungkan intelijen Australia langsung ke Bagian Perbatasan Internasional Sekretariat NCB-Interpol Indonesia. Pembentukan Bagbatanas merupakan tindakan strategis dari Polri untuk membangun institusi yang

tangguh untuk memerangi kejahatan transnasional, terutama penyelundupan manusia. Peningkatan peran institusional ini memberikan landasan operasional yang stabil untuk kerja sama Polri dan Australian Federal Police (AFP) di periode 2019–2024. Struktur kerja sama yang stabil ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian informasi karena menyediakan jalur birokrasi yang terstandarisasi. Hal ini berarti bahwa respons operasional tidak lagi bergantung pada kehendak individu, tetapi lebih berfokus pada aturan institusi yang baku. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional dan memastikan adanya ingatan institusional yang berkelanjutan.

Keempat, *International Border Forum* yang dilaksanakan oleh Polri dan AFP. Forum ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama Polri dan AFP dalam melawan penyelundupan manusia, meninjau lokasi kedatangan pengungsi yang terpencil, serta melakukan pertemuan dengan otoritas Australia seperti Australian Border Force (ABF) dan Northern Territory Police. Dalam forum ini, terdapat mekanisme *co-funding* antara Polri dan AFP yang menunjukkan adanya asas timbal balik dan komitmen yang setara antara kedua negara untuk menjaga stabilitas keamanan regional. Bentuk institusionalisasi ini berhasil meningkatkan kepercayaan antarinstansi melalui transparansi yang lebih tinggi.

Pada akhirnya, upaya kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Australia, khususnya Polri dan AFP memberikan keuntungan absolut kepada masing-masing pihak, dimana Indonesia memperoleh peningkatan kapasitas personel, dan Australia memperoleh kekuatan pengawasan di tingkat hulu (Indonesia sebagai titik transit penyelundupan manusia).

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kelemahan dalam penelitian ini, sehingga penulis mengajukan saran, yaitu penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif atau *mixed-method* untuk mengukur dampak peningkatan kerja sama bilateral Indonesia dan Australia terhadap penurunan angka penyelundupan manusia, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif.